



RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2024



BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

**UPTD RSUD DEPATI HAMZAH
KOTA PANGKALPINANG**

☎ Jl. Soekarno Hatta Pangkalpinang 33143
☎ Telp. (0717) 422693
☎ Fax. (0717) 421324
☎ Email : depatihamzah_rsud@yahoo.co.id

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA RSUD.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD.....	10
2.3 Review Terhadap Ranwal dan Ranhir RKPD	23
2.4 Usulan Program dan Kegiatan RSUD.....	25

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional	27
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.....	30
3.3. Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Depati Hamzah	32
3.4. Program dan Kegiatan	33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

34

BAB V PENUTUP

40

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia yang diberikan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024.

RENJA BLUD UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang mengacu pada RENSTRA BLUD UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

Dokumen RENJA BLUD UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang merupakan bagian dari dokumen perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan UPTD RSUD Depati Hamzah untuk satu tahun mendatang (Tahun 2024) melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan dan menjadi pedoman UPTD RSUD Depati Hamzah.

Kami mencoba menyusun RENJA BLUD UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2024, namun kami menyadari dengan segala keterbatasan yang ada sehingga dalam menyusun RENJA ini masih jauh dari harapan, oleh karena itu kami mengharapkan adanya saran dan masukan dalam penyusunan RENJA yang akan datang.

Pangkalpinang, Desember 2023
UPTD RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang
Pimpinan BLUD,

dr. DELLA RIANADITA
NIP. 19890603 201502 2 001

1.1 LATAR BELAKANG

Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang saat ini mempunyai klasifikasi Rumah Sakit Tipe C berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 197/MENKES/SK/II/1993 tanggal 26 November 2007. Tugas pokok dan fungsi RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang.

RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang telah ditetapkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) dengan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 477/KEP/RSUD/VIII/2010 Tentang penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah pangkalpinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kota Pangkalpinang yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh. Pengelolaan keuangan Rumah Sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah upaya untuk mengatasi permasalahan dan memudahkan rumah sakit daerah menjadi suatu lembaga yang mampu mengupayakan peningkatan kinerja pelayanan, kinerja keuangan serta optimal dalam memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sedangkan pengertian Rumah Sakit sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, adalah institusi atau organisasi perangkat daerah, pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan pelayanan penunjang kesehatan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah

Sakit tersebut juga memuat kewajiban Rumah Sakit dalam upaya peningkatan mutu pelayanan untuk melaksanakan penilaian akreditasi secara berkala minimal 3 tahun sekali. Penilaian akreditasi RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang telah dilakukan pada tahun 2022 dengan meraih predikat akreditasi paripurna berdasarkan sertifikat akreditasi Rumah Sakit Nomor; 075/SERT-AKR/LAM-KPRS/Set/XII/2022 dengan masa berlaku 30 November 2022 sampai dengan 29 November 2026.

Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai BLUD, APBD Kota, APBD Provinsi maupun APBN.

Penyusunan Rencana Kerja UPTD perkembangan dalam meningkatkan kinerja yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional, maupun global.

Selanjutnya Rencana Kerja UPTD RSUD Depati Hamzah Tahun 2024, akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPTD RSUD Depati Hamzah Tahun 2024 serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang Tahun 2024, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2023 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017)
 9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08, Seri E Nomor 04);
 10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;
 11. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 26 Tahun 2021 Tentang RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Tanggal 1 Juli 2021 (Berita Daerah Nomor 26);
 12. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan kota Pangkalpinang;
 13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023);
 14. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan

dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Bisnis Anggaran UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang antara lain :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan manajemen Rumah Sakit yang transparan, efektif dan efisien, responsif serta berkeadilan, dengan tersedianya rencana kerja sebagai pedoman arah dan tujuan yang pasti;
2. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi dan tujuan rumah sakit;
3. Mengembangkan pola pikir sumber daya manusia dan manajemen rumah sakit kepada sikap dan tindakan yang berorientasi pada koridor perencanaan yang telah ditetapkan;
4. Tercapainya Efektifitas dan Efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada guna terwujudnya visi, tercapainya misi dan tujuan pembangunan;
5. Tersusunnya Program, Rencana Kegiatan, dengan indikator-indikator program dan kegiatan yang akan dicapai, sumber-sumber pembiayaan/dana yang diperlukan, Tatakala Kegiatan dengan jelas, terinci dan terstruktur, sehingga dapat diwujudkan visi, dan tercapainya misi yang diinginkan pada waktu yang telah direncanakan;
6. Melakukan identifikasi dan antisipasi terhadap kelemahan, tantangan serta hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Kerja sehingga dapat menyusun strategi pemecahan masalah dengan tepat.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Renja UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang. Tahun 2024, meliputi :

- BAB I Pendahuluan
Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan
- BAB II Hasil evaluasi Renja RSUD Depati Hamzah tahun 2022
Menjelaskan evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB III Tujuan dan Sasaran RSUD Depati Hamzah
Menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja SKPD.
- BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD Depati Hamzah
Menjelaskan rencana kerja dan pendanaan program dan kegiatan SKPD.
- BAB V Penutup
Menjelaskan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana tindak lanjut.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) dan pencapaian RENSTRA Tahun 2019-2023 UPTD RSUD Depati Hamzah adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah :

TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (AJIBIR RENSTRA) TAHUN 2023		REALISASI TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN 2022		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022						REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.O TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
			K	Satuan	Rp	K	Rp	TARGET ANGGARAN YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN YANG DIEVALUASI		TINGKAT REALISASI (%)		K		Rp
								K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16		Program Usaha Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk yang memanfaatkan RS	100	%	3.678.857.181,00	100	2.878.353.660,00				-	0	100	2.878.353.660,00	78,24
	43	Kegiatan Penyelenggaraan Kesehatan Dasar Rumah Sakit	Bagi operasional pelayanan kesehatan RSU yang terakreditasi I RSU	12	bln	3.678.857.181,00	12	2.878.353.660,00				-	0	12	2.878.353.660,00	78,24
23		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Terealisasi Standar Pelayanan di RS	100	%	6.496.930.000,00	100	4.908.083.028,00				-	0	100	4.908.083.028,00	75,51
	60	Kegiatan akreditasi Rumah Sakit	Rumah sakit terakreditasi versi 2017	1	RS	342.630.000,00	1	246.989.028,00				-	0	1	246.989.028,00	72,09
	60	Kegiatan Penyediaan Tenaga Pemenuhan Standarisasi Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Terealisasi tenaga pemenuhan standarisasi mutu pelayanan RS	12	bln	6.157.300.000,00	12	4.661.094.000,00				-	0	12	4.661.094.000,00	75,70
26		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Peralatan Rumah Sakit/RSJ/RS-Paru-paru/ RS Mata	Terealisasi biaya alat-alat bedokteran	1	pkt	12.052.979.245,00	1	11.727.742.237,00				-	0	1	11.727.742.237,00	97,30
	18	Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah alat - alat kesehatan RS yang dibeli	87	Unit	12.052.979.245,00	87	11.727.742.237,00				-	0	87,00	11.727.742.237,00	97,30
41		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu	90	%	66.371.485.030,00	78,12	63.604.250.624,60				-	0	78,12	63.604.250.624,60	95,83
	61	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD	Terealisasi biaya operasional RS	24	bln	58.770.098.430,00	24	57.240.293.133,60				-	0	24	57.240.293.133,60	97,40
	62	Pengelolaan Kesehatan Dasar Rumah Sakit	Terealisasi biaya operasional RS	12	bln	7.426.836.800,00	12	6.234.181.289,00				-	0	12	6.234.181.289,00	83,94
	63	Peningkatan Sarana Peralatan Rumah Sakit	Jumlah Sarana Peralatan Rumah Sakit	6	unit	124.550.000,00	6	129.776.202,00				-	0	6	129.776.202,00	74,35
42		PROGRAM PEBINGKATAN PELAYANAN BIDANG KESEHATAN	Terealisasi biaya pelayanan bidang kesehatan	100	%	4.325.327.814,00	100	3.420.755.636,00				-	0	100	3.420.755.636,00	79,09
	67	1. Pencegahan dan Penanganan Gejala Virus Demam (COVID 19) Rumah Sakit	Terdokumentasi pencegahan dan penanganan covid	116	org	4.325.327.814,00	116	3.420.755.636,00				-	0	116	3.420.755.636,00	79,09
43		Program Peningkatan Mutu Bidang Kesehatan	Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar	100	%	7.583.097.000,00		6.449.649.787,00				-	0	0	6.449.649.787,00	85,05
	68	Pengembangan pembangunan gedung baru Rumah Sakit	Jumlah bangunan gedung baru													
	71	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat kesehatan RS	98	unit	6.838.961.573,00	79	5.733.212.360,00				-	0	79	5.733.212.360,00	81,83
	73	Pengadaan alat kesehatan Ruang Isolasi Covid 19	Jumlah alat kesehatan Ruang Isolasi Covid 19	3	unit	744.135.427,00	3	716.437.427,00				-	0	3	716.437.427,00	96,28

01			PROGRAM PERUNJANG URURAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	75	%	183.919.952.893,00	4.479.461.076,00	75	1.938.099.487,00		1.822.126.742,00	0	94,02	0	6.301.587.818,00	3,43	
	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan	75	%	183.919.952.893,00	4.479.461.076,00	75	1.938.099.487,00		1.822.126.742,00	0	94,02	0	6.301.587.818,00	3,43	
		01	Pelaksanaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	303	org/bln	183.919.952.893,00	4.479.461.076,00	99	1.938.099.487,00	99	1.822.126.742,00	100	94,02	99	6.301.587.818,00	3,43	
02			PROGRAM PERSIHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	%	294.378.363.800,00	83,78	92.586.686.026,08	90	78.709.865.985,00	86,94	68.996.607.863,08	96,60	86,90	170,72	0,00	
				Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	67	%			67				0		-		#DIV/0!	
				Persentase Pelayanan Rumah Sakit yang bermutu	95	%		82,1	95		84,60		89		166,7		#DIV/0!	
	2	01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	100	%	136.176.807.180,00	100	52.230.602.173,00	100	11.490.099.832,00	100	11.378.903.620,00	100	99,03	200	63.609.585.793,00	46,71
		01	Pembangunan Rumah Sakit beserta sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Rujukan Kab/Kota yang memenuhi sarana, prasarana dan														
		05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit Rujukan Kab/Kota yang memenuhi sarana, prasarana dan	3	RS/unit	72.159.095.580,00	2	42.392.328.168,00	3	4.711.506.900,00	1	4.707.737.900,00	100	99,02	3	47.100.066.058,00	63,77
		12	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	208	unit/prasarana	7.790.662.548,00	175	2.119.514.540,00	3	1.530.598.000,00	148	1.527.704.950,00	4967	99,81	324	3.647.219.499,00	46,82
		14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	302	unit	56.227.129.032,00	98	7.718.839.456,00	194	5.247.994.932,00	192	5.143.460.770,00	99	98,01	290	12.862.300.226,00	22,88
	2	02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	100	%	158.201.476.620,00	100	40.356.063.853,08	100	67.219.706.153,00	100	57.017.704.041,08	100	84,82	200	97.379.707.894,16	61,55
		21	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis	Terlaksananya kegiatan pengurangan risiko kesehatan	104	unit	1.187.050.000,00	103	1.169.993.959,00						103	1.169.993.959,00	98,56	
		22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Terlaksananya pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan bagian layanan	238	org/dok	156.814.426.620,00		39.186.009.804,08	4	67.019.766.153,00	4	56.842.432.486,08	100	84,81	4	96.028.442.380,16	61,34
		23	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya akreditasi Rumah Sakit	1	RS	200.000.000,00			1	200.000.000,00	1	175.271.555,00	100	87,64	1	175.271.555,00	87,64
03			PROGRAM Peningkatan KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan Kota yang memberikan pelayanan kesehatan	100	%	4.257.215.308,00	100	2.573.914.381,00	100	850.092.905,00	100	790.450.062,00	100	99	200	3.364.364.413,00	79,03
	2	02	Pemenuhan Kebutuhan dan Penguatan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dan penguatan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	100	%	4.257.215.308,00	100	2.573.914.381,00	100	850.092.905,00	100	790.450.062,00	100	99	200	3.364.364.413,00	79,03
		02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terlaksananya layanan penyediaan tenaga Pemenuhan standar tenaga	150	org	4.257.215.308,00	100	2.573.914.381,00	50	850.092.905,00	50	790.450.062,00	100	99	150	3.364.364.413,00	79,03
			TOTAL				583.067.206.271,00	192.628.896.455,68		81.498.058.377,00		71.009.184.485,08		87,13		102.654.787.233,60	17,61	

2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan

Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			Standar Depkes
		Target	Realisasi Per 31 Desember	Pencapaian %	
BOR	31 %	67 %	36 %	53,7	60 - 85 %
BTO	32 kali	50 kali	41 kali	82,0	40 - 50 kali
LOS	3 hari	4 hari	3 hari	75,0	6 - 9 hari
TOI	8 hari	2 hari	5 hari	250,0	1 - 3 hari
SPM	82,10 %	90 %	84,60 %	94,0	
IKM	83,78 %	88 %	86,94 %	98,8	

Realisasi capaian indikator per 31 Desember tahun 2022 dari 6 (enam) indikator kinerja sasaran yang ditargetkan belum sesuai dengan target yang diinginkan dan belum sesuai dengan standar Depkes. Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. BOR (*Bed Occupancy Ratio*) adalah tingkat pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit atau ratio rata-rata pemanfaatan tempat tidur yang terisi tahun 2022 sebesar 36 %.
2. BTO (*Bed Turn Over*) adalah rata-rata produktivitas tempat tidur/perputaran pergantian orang dalam kurun waktu 12 bulan adalah sebesar 41 kali.
3. LOS (*Legth Of Stay*) adalah rata-rata lamanya pasien dirawat kurun waktu 12 bulan sebesar 3 hari, angka ini lebih rendah dari standar yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI sebesar 6-9 hari. Bila ratio lebih rendah dari standar yang ditetapkan maka harus adanya evaluasi untuk peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.
4. TOI (*Turn Over Interval*) adalah rata-rata jumlah tempat tidur yang kosong kurun waktu 12 bulan sebesar 5 hari, angka ini lebih tinggi dari standar yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI sebesar 1-3 hari. Bila ratio lebih tinggi dari

standar yang ditetapkan maka harus adanya evaluasi untuk peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.

5. Untuk capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) UPTD RSUD Depati Hamzah Tahun 2022 sebesar 84,60 % dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022

N O	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA CAPAIAN 2022	CAPAIAN PER 31 DESEMBER 2022	KET	KETERANGAN/ PENYEBAB/KENDALA	STRATEGI PENYELESAIAN
1	Gawat Darurat	1 Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100 %	100%	100%	tercapai		
		2 Jam buka Pelayanan Gawat Darurat 24 jam	24 Jam	24 jam	24 jam	tercapai		
		3 Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS	100 %	100%	100%	tercapai		
		4 Ketersediaan tim penanggulangan bencana	Satu Tim	ada	1 tim	tercapai		
		5 Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	≤ 5 menit terlayani, setelah pasien datang	5 menit	5 menit	tercapai		
		6 Kepuasan Pelanggan	≥ 70 %	99%	89,60%	tercapai		
		7 Kematian pasien < 24 Jam	≤ dua per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	4/1000	0,009	tidak tercapai	Kondisi pasien pada saat datang ke IGD sudah parah	Meningkatkan kompetensi dan tim work SDM IGD
		8 Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100 %	100%	100 %	tercapai		
		9 Pasien Jiwa yang dapat ditenangkan dalam waktu ≤ 48 jam	100 %	n/a	0	Tidak ada Kasus		
2	Rawat Jalan	1 Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis	100 % Dokter Spesialis	100 % Dokter Spesialis	100 % Dokter Spesialis	tercapai		

N O	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA CAPAIAN 2022	CAPAIAN PER 31 DESEMBER 2022	KET	KETERANGAN/ PENYEBAB/KENDALA	STRATEGI PENYELESAIAN
		2 Ketersediaan Pelayanan Rawat Jalan	a. Klinik Anak b. Klinik Penyakit Dalam c. Klinik Kebidanan d. Klinik Bedah	Ada	100% Ada	tercapai		
		3 Jam buka pelayanan 08.00 s/d 13.00	08.00 s/d 13.00 Setiap hari kerja kecuali Jumat : 08.00 - 11.00	100%	100%	tercapai		
		4 Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 menit	60 menit	120 menit	tidak tercapai	Ada beberapa Dokter Spesialis yang datangnya terlambat sehingga pasien harus menunggu lama (menunggu > 60 menit)	Manajemen harus mendisiplinkan jam datang Dokter Spesialis. Baik teguran lisan maupun tertulis
		5 Kepuasan Pelanggan	> 90 %	85%	87,1%	tidak tercapai	Waktu tunggu yang lama (lebih dari 1,5 jam)	Mengatur/mendisiplinkan jam mulai pelayanan dokter di klinik sehingga tidak membuat pasien menunggu terlalu lama
		6 a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	≤ 60 % ≤ 60 %	100% 100%	100% 100%	tercapai tercapai		
3	Rawat Inap	1 Pemberi pelayanan di Rawat Inap	a. dr. Spesialis b. Perawat minimal pendidikan D3	Ada Ada, 100%	100% ada 100% ada	tercapai tercapai		
		2 Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100 %	100%	100%	tercapai		
		3 Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	a. Anak b. Penyakit Dalam c. Kebidanan d. Bedah	Ada Ada Ada Ada	Ada 100% Ada 100% Ada 100% Ada 100%	tercapai tercapai tercapai tercapai		

N O	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA CAPAIAN 2022	CAPAIAN PER 31 DESEMBER 2022	KET	KETERANGAN/ PENYEBAB/KENDALA	STRATEGI PENYELESAIAN
		4 Jam Visite Dokter Spesialis	08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja	100%	100%	tercapai		
		5 Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1,5 %	1,4%	0,00%	tercapai		
		6 Kejadian Infeksi Nosokomial	≤ 9 %	1,5%	0%	Data Nosoko mial tidak ada		
		7 Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/ kematian	100 %	100 %	100 %	tercapai		
		8 Kematian pasien > 48 jam	≤ 0.24 %	0,25%	1,10%	tidak tercapai	RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang sebagai rumah sakit rujukan Covid 19 dan Non Covid 19 di Provinsi Kep. Babel yang rerata menerima kasus rujukan dengan kondisi penyakit pasien yang berat	1 Meningkatkan mutu - pelayanan RS, 2 Pembustan Hospital - Mortality Reduction Programme (HMRP) merupakan strategi untuk memperbaiki sistem observasi klinis dengan pembuatan instrument untuk menilai tingkat keparahan kondisi klinis pasien dan kapan intervensi diperlukan.
		9 Kejadian pulang paksa	≤ 5 %	5,0%	3,80%	tercapai		
		10 Kepuasan pelanggan	≥ 90 %	98%	92,75%	tercapai		
		11 Rawat Inap TB						
		a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	≥ 60%	100 %	100 %	tercapai		
		b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	≥ 60%	100 %	100 %	tercapai		

N O	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA CAPAIAN 2022	CAPAIAN PER 31 DESEMBER 2022	KET	KETERANGAN/ PENYEBAB/KENDALA	STRATEGI PENYELESAIAN
		12 Keterampilan pelayanan rawat inap di rumah sakit yang memberikan pelayanan jiwa	NAPZA, Gangguan Psikotik, Gangguan Neurotik, Gangguan Mental Organik	-	tersedia	tercapai		
		13 Tidak adanya kematian pasien gangguan jiwa karena bunuh diri	100 %		-	Tidak ada Kasus		
		14 Kejadian re-admission pasien gangguan jiwa dalam waktu ≤ 1 bulan	100 %		-	Tidak ada Kasus		
		15 Lama hari perawatan pasien gangguan jiwa	≤ 6 minggu		-	Tidak ada Kasus		
4	Bedah Sentral	1 Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari	≤ 2 hari	≤ 2 hari	tercapai		
		2 Kejadian Kematian di meja operasi	≤ 1 %	0%	0%	tercapai		
		3 Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100 %	100 %	0%	tercapai		
		4 Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100 %	100 %	0%	tercapai		
		5 Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100 %	100 %	0%	tercapai		
		6 Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100 %	100 %	0%	tercapai		
		7 Komplikasi anestesi karena overdoais, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi endotracheal tube	≤ 6 %	1,50%	0%	tercapai		
5	Persalinan, perinatologi (kecuali rumah sakit khusus di luar rumah	1 Kejadian kematian ibu karena persalinan	a. Perdarahan ≤ 1%	0%	0%	tercapai		
			b. Pre-eklampsia ≤ 30 %	0,01%	0%	tercapai		
			c. Sepsis ≤ 0,2 %	0%	0%			

N O	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA CAPAIAN 2022	CAPAIAN PER 31 DESEMBER 2022	KET	KETERANGAN/ PENYEBAB/KENDALA	STRATEGI PENYELESAIAN
	sakit ibu dan anak) dan KB	2 Pemberi pelayanan persalinan normal	a. Dokter Sp. OG b. Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal) c. Bidan	Ada Ada Ada	100% Ada 100% Ada 100% Ada	tercapai tercapai		
		3 Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tim PONEK yang terlatih	Ada	Tersedia	tercapai		
		4 Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	a. Dokter Sp. OG b. Dokter Sp. A c. Dokter Sp. An	Ada Ada Ada	100% Ada 100% Ada 100% Ada	tercapai tercapai tercapai		
		5 Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	100 %	95%	100%	tercapai		
		6 Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	≤ 20 %	10%	27,30%	tidak tercapai	Pasien (persalinan) yang dirujuk ke RSUD Depati Hamzah adalah persalinan dengan kesulitan tertentu dan harus dilakukan persalinan dengan seksio cesaria	Sosialisasi kepada setiap ibu hamil yang melakukan pemeriksaan ke RSUD Depati Hamzah agar dapat melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin sehingga kondisi janin selalu terpantau dan agar dapat mengikuti semua anjuran dokter jika ada permasalahan kandungan
		7 Keluarga Berencana						
		a. Presentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga Kompeten dr. Sp. Og, dr. Sp. B, dr. Sp. U, dr. umum terlatih	100%	100%	100%	tercapai		
		b. Presentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap bidan terlatih	100%	100%	100%	tercapai		

N O	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA CAPAIAN 2022	CAPAIAN PER 31 DESEMBER 2022	KET	KETERANGAN/ PENYEBAB/KENDALA	STRATEGI PENYELESAIAN
		8 Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %	95%	88,67%	tercapai		
6	Intensif	1 Rata rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3 %	1,0%	0%	tercapai		
		2 Pemberi pelayanan Unit Intensif	a. Dokter Sp.Anestesi dan dokter spesialis esuai dengan kasus yang ditangani b. 100 % Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU/setara (D4)	Ada 100%	Ada 60% Ada	tercapai tidak tercapai	Jumlah tenaga perawat yang bersertifikat mahir ICU hanya 9 orang dari total 15 orang perawat	usulan untuk mengikuti pelatihan perawat mahir ICU untuk perawat lainnya yang belum memiliki sertifikat
7	Radiologi	1 Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	< 3 jam	2,5 jam	2 jam, 6 menit	tercapai		
		2 Pelaksana ekspertisi	Dokter Sp.Rad	Ada, 80%	89%	tidak tercapai	1 Dokter spesialis radiologi yang ada hanya 1 orang sedangkan pelayanan ekspertisi hasil rontgen harus stanby 1 x 24 jam setiap hari 2 Pasien yang berobat langsung pulang, sehingga hasil pemeriksaan rontgen belum terbaca	1 Sosialisasi kepada pasien atau keluarga pasien agar menunggu hasil rontgen dibacakan dulu sebelum pasien pulang 2 Mengajukan dokter spesialis radiologi sehingga bisa dibagi shift pagi dan shift siang 3 Pengadaan picture archiving communication system (PACS)
		3 Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	Kerusakan foto ≤ 2 %	1%	1,22%	tercapai		
		4 Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	90%	89,90%	tercapai		

N O	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA CAPAIAN 2022	CAPAIAN PER 31 DESEMBER 2022	KET	KETERANGAN/ PENYEBAB/KENDALA	STRATEGI PENYELESAIAN
8	Laboratorium Patologi Klinik	1 Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 140 menit Kimia darah & darah rutin	120 menit	99 menit	tercapai		
		2 Pelaksana ekspertisi	Dokter Sp.PK	Ada, 99%	Ada, 100%	tercapai		
		3 Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksa laboratorium	100 %	100 %	100 %	tercapai		
		4 Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	90%	93,10%	tercapai		
9	Rehabilitasi Medik	1 Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang di rencanakan	≤ 50 %	20%	4,2%	tercapai		
		2 Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100 %	100 %	100 %	tercapai		
		3 Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %	95%	89,50%	tercapai		
10	Farmasi	1 Waktu tunggu pelayanan a. Obat Jadi b. Racikan	a. ≤ 30 menit b. ≤ 60 menit	≤ 30 menit ≤ 60 menit	11,3 menit 25,8 menit	tercapai tercapai		
		2 Tidak adanya Kejadian kesalahan pemberian obat	100 %	100 %	100%	tercapai		
		3 Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	95%	87,30%	tercapai		
		4 Penulisan resep sesuai formularium	100 %	100%	95,2%	tidak tercapai		
11	Gizi	1 Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90 %	98%	96,5%	tercapai		
		2 Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20 %	≤ 20 %	16,10%	tercapai		
		3 Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100 %	100 %	100 %	tercapai		
12	Transfusi Darah	1 Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100 % terpenuhi	100%	35,10%	tidak tercapai	Stock darah yang tersedia belum mencukupi untuk semua permintaan	Mengajak semua civitas rumah sakit untuk ikut donor darah

N O	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA CAPAIAN 2022	CAPAIAN PER 31 DESEMBER 2022	KET	KETERANGAN/ PENYEBAB/KENDALA	STRATEGI PENYELESAIAN
		2 Kejadian Reaksi transfusi	≤ 0,01 %	≤ 0,01 %	0,2%	tidak tercapai	Disebabkan karena reaksi imunologi antara sistem imun pasien dengan komponen darah yang ditransfusikan	Meningkatkan skrining
13	Pelayanan GAKIN	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke Rumah Sakit pada setiap unit pelayanan	100 % terlayani	100%	100% terlayani	tercapai		
14	Rekam Medik	1 Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100 %	100%	81,20%	tidak tercapai	1 Tidak lengkapnya tanda tangan dokter, TBK Serah terima 2 Ketidaksiplinan petugas kesehatan dalam melakukan pengisian informed consent	Meningkatkan koordinasi masing-masing ruangan rawat inap
		2 Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100 %	100%	59,60%	tidak tercapai	Tidak terisinya informasi tindakan ke pasien dan tanda tangan pasien dan dokter	Meningkatkan koordinasi keruangan dan DPJP untuk mengecek kelengkapan sebelum menyeter ke instalasi RM
		3 Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit	7 menit	4 menit	tercapai		
		4 Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit	10 menit	15 menit	tercapai		
15	Pengelolaan Limbah	1 Baku mutu limbah cair	a. BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9	4,04 mg/l 21,20 mg/l 0 7	19,6 mg/l 45,9 mg/l 5 mg/l 6,69	tercapai tercapai tercapai tercapai		
		2 Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100 %	100%	100%	tercapai		
16	Administrasi dan Manajemen	1 Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	100%	100%	tercapai		

N O	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA CAPAIAN 2022	CAPAIAN PER 31 DESEMBER 2022	KET	KETERANGAN/ PENYEBAB/KENDALA	STRATEGI PENYELESAIAN
		2 Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	100%	90,62%	tidak tercapai	penyusunan laporan standar pelayanan minimal (SPM) RSUD Depati Hamzah saat ini masih persemester	Sosialisasi kepada pegawai RS tentang pentingnya laporan SPM dan mengkoordinasikan agar semua pegawai yang terkait dengan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan SPM agar dapat melaporkan data ke manajemen tepat waktu
		3 Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%	100%	tercapai		
		4 Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	100%	100%	tercapai		
		5 Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60 %	80%	10,90%	tidak tercapai	Terdapat beberapa pelatihan yang tidak dapat dilaksanakan antara lain disebabkan pelatihan yang berbenturan waktu pelaksanaannya, tidak adanya SDM yang memenuhi kriteria untuk mengikuti pelatihan tertentu dan anggaran untuk pelatihan tidak mencukupi	Usulan untuk mengadakan pelatihan internal maupun eksternal untuk karyawan pelatihan minimal 20 jam setahun
		6 Cost recovery	≥ 40 %	139%	101,00%	tercapai		
		7 Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	100%	tercapai		
		8 Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤ 2 jam	≤ 2 jam	45 menit	tercapai		
		9 Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	100%	tercapai		
17	Ambulance/ Kereta Jenazah	1 Waktu pelayanan ambulance/ Kereta jenazah	24 jam	24 jam	24 jam			

N O	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA CAPAIAN 2022	CAPAIAN PER 31 DESEMBER 2022	KET	KETERANGAN/ PENYEBAB/KENDALA	STRATEGI PENYELESAIAN
		2 Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/ Kereta jenazah di rumah sakit	a. ≤ 30 menit	≤ 30 menit	27 menit	tercapai		
		3 Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	Sesuai ketentuan daerah	Belum Ada Perda	-	tidak tercapai	Belum ada perda	Dilakukan Koordinasi berulang kepada Pemda setempat
18	Pemulasaraan Jenazah	1 Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 Jam	< 2 Jam	1 Jam 30 menit	tercapai		
19	Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit	1 Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	< 80 %	memenuhi	90%	tercapai		
		2 Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100 %	100%	100%	tercapai		
		3 Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100 %	100%	100%	tercapai		
20	Pelayanan Laundry	1 Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100 %	100%	100%	tercapai		
		2 Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100 %	100%	100%	tercapai		
21	Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)	1 Ada anggota Tim PPI yang terlatih	Anggota Tim PPI yang terlatih 75 %	100%	100%	tercapai		
		2 Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen	60%	100%	100%	tercapai		
		3 Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter)	75%	100%	100%	tercapai		

6. Rata – rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan UPTD RSUD Depati Hamzah pada tahun 2022 sebesar 86,94 % dengan uraian dibawah ini :

Tabel 2.4

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2022

NO	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tahun 2021	Semester I Tahun 2022	Indikator Mutu Pelayanan	Semester II Tahun 2022	Indikator Mutu Pelayanan
1	Rawat Jalan	80,80 %	80,20 %	B	87,13 %	A
2	Rawat Inap	85,40 %	83,25 %	A	92,75 %	A
3	IGD	85,65 %	85,91 %	A	89,60 %	A
4	ICU	81,50 %	80,62 %	B	89,83 %	A
5	Kamar Operasi	85,80 %	85,90 %	A	-	
6	Kehidanan	84,60 %	84,80 %	A	88,67 %	A
7	Laboratorium	94,20 %	91,15 %	A	93,10 %	A
8	Radiologi	85,55 %	88,70 %	A	89,90 %	A
9	Fisioterapi	85,00 %	85,70 %	A	89,50 %	A
10	Farmasi	85,60 %	84,80 %	A	87,30 %	A
11	Rekam Medis	77,90 %	81,85 %	A	-	
12	Gakin	81,90 %	82,80 %	A	-	
13	Gizi	75,25 %	78,00 %	B	-	
	TOTAL IKM	1.089,15	1.093,68		807,78	
	IKM	83,78 %	84,13		89,75	
	IKM RS Tahun 2022	86,94				

Keterangan :

1. Sangat Baik (A) : 81,26 – 100
2. Baik (B) : 62,51 – 81,25
3. Kurang Baik (C) : 43,76 – 62,50
4. Tidak Baik (D) : 25 – 43,75

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa indikator kepuasan masyarakat di RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang Tahun 2022 **Sangat Baik**.

2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL

Adapun perbandingan antara RKPD 2024 dengan rancangan awal usulan RKPD UPTD RSUD Depati Hamzah adalah Kota Pangkalpinang pada tabel berikut :

Tabel 2.5

Review Terhadap Rancangan Awal Dan Analisis Kebutuhan Tahun 2024

Kode	Urusan /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Sumber Pendanaan (Rp)..... **)					Total Anggaran
		Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		APBD Kab/Kota	APBD Provinsi	APBN			
		Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			DEKO N	TP	DAK	
1.02	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan							34.379.300.300	-	-	-	-	34.379.300.300
1.02.02	A. PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	77%					2.250.000.300	-	-	-	-	2.250.000.300
		Persentase Pelayanan Rumah Sakit yang bermutu	90%										
1.02.02.2.01	1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%			2.250.000.300	-	-	-	-	2.250.000.300
1.02.02.2.01.05	a. Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit					Jumlah Rumah Sakit Rujukan Kab/Kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standart	1 RS	2.250.000.300				-	2.250.000.300

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Sumber Pendanaan (Rp)..... **)					Total Anggaran
		Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		APBD Kab/Kota	APBD Provinsi	APBN			
		Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			DEKO N	TP	DAK	
1.02.02	B. Bidang/Program Pemeruban Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk Persentase Pelayanan Rumah Sakit yang bermutu	65% 90%					32.129.300.000	-	-	-	-	32.129.300.000
1.02.02.2.02	1. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah			Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%			32.129.300.000	-	-	-	-	32.129.300.000
1.02.02.2.02.32	a. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit					Terlaksananya pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	12 bin	32.129.300.000					32.129.300.000

2.4 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Kota Pangkalpinang Tahun 2024

UPTD : RSUD Depati Hamzah

KODE	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN		
		INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5
1.02	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan			73.973.589.889
1.02.01	A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	90,2	33.129.300.189
		Indeks Kepuasan Masyarakat	90	
1.02.01.2.10	1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	18%	33.129.300.189
	a. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	33.129.300.189
1.02.02	B. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Depati Hamzah	90	40.844.289.700
		Indeks Capaian SPM	90%	
		Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	77%	
		Persentase pemenuhan alat kesehatan/alat penunjang medik di RSUD Depati Hamzah sesuai standar	100%	
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	
1.02.02.2.01	1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	40.844.289.700
1.02.02.2.01.05	a. Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 unit	17.079.039.336

KODE	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN		
		INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5
1.02.02.2.01.14	b. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 paket	23.765.250.364

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024:

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, disebutkan bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya. Oleh karena itu perlu disusun rencana pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. Secara filosofis, kondisi sehat-sakit adalah produk dari seluruh tindakan manusia, baik tindakan penentu kebijakan publik di setiap level pemerintahan maupun tindakan (perilaku) anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak ada perilaku atau tindakan manusia yang tidak berpengaruh terhadap kesehatan. Seluruh komponen bangsa mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan, baik itu anggota masyarakat, pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan, maupun profesi. Seluruh pembangunan sektoral harus mempertimbangkan kontribusi dan dampaknya terhadap kesehatan (*health in all policies*).

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, menetapkan Sistem Kesehatan Nasional sebagai paradigma pemikiran dasar pengelolaan administrasi pembangunan kesehatan, yang harus diperkuat oleh kepemimpinan pada setiap level pemerintahan yang mampu menciptakan berbagai terobosan dan inovasi menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Prinsip dasar pembangunan kesehatan terdiri dari :

- 1) Perikemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
- 2) Pemberdayaan dan kemandirian bagi setiap orang dan masyarakat;
- 3) Adil dan merata bagi setiap orang yang mempunyai hak yang sama;
- 4) serta Pengutamaan upaya dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan pengutamaan manfaat yang merupakan bagian dari butir Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis.

RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik . Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang

kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, khususnya dalam bidang kesehatan ditandai dengan :

- 1) Terjaminnya keamanan kesehatan negara melalui kemampuan dalam melakukan pencegahan, deteksi, dan respon terhadap ancaman kesehatan global;
- 2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat yang ditunjukkan dengan jangkauan bagi setiap warga negara terhadap lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh;
- 3) Status kesehatan dan gizi masyarakat yang semakin meningkat serta proses tumbuh kembang yang optimal, yang ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dan *Healthy Adjusted Life Expectancy* (HALE).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian Kesehatan dan Rencana Kerja Pemerintah. Penyusunan Renstra Kementerian Kesehatan dilaksanakan melalui pendekatan: teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (*topdown*), dan bawah-atas (*bottom-up*).

Ancaman kesehatan masyarakat lainnya yang tidak dapat diabaikan adalah ancaman dalam bentuk risiko biologi, kimia, terorisme, radio-nuklir, penyakit zoonosis (penyakit tular hewan), kedaruratan kesehatan masyarakat, dan ancaman penyakit yang baru muncul (*new emerging diseases*). Adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 harus dipergunakan sebagai pembelajaran terkait

kesiapsiagaan menghadapi penyakit baru muncul (*new emerging diseases*), khususnya dalam menyiapkan sistem kesehatan yang mampu merespon kegawatdaruratan kesehatan masyarakat. Sekitar 70% dari penyakit infeksi pada manusia yang baru adalah penyakit zoonosis, yang sangat dipengaruhi oleh interaksi antara manusia dan lingkungannya. Penduduk Indonesia yang padat dengan geografis yang luas menyebabkan terbukanya transportasi di dalam negeri maupun antar negara yang dapat menyebabkan masuknya agen penyakit baru.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi misi dan program kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders.

Berdasarkan kondisi masyarakat Kota Pangkalpinang saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah. maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2019-2023, dicanangkan Visi Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :
"Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM"

Visi UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang adalah **"Menjadi Rumah Sakit yang nyaman dan unggul"**

dalam pelayanan”. Visi RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai visi UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut yaitu RSUD Depati Hamzah sebagai Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang, yang terletak di ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang memiliki tujuan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kota Pangkalpinang untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.
- 2) Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
- 3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*.
- 4) Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan.
- 5) Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perwujudan visi UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang ditempuh melalui misi. Untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 4 misi, sebagai berikut :

- 1) Memberikan Pelayanan Kesehatan yang bermutu, terjangkau, profesional dan berorientasi pada pasien.
- 2) Mengembangkan pelayanan unggulan yang inovatif.
- 3) Menyelenggarakan kemitraan pelayanan dan pendidikan kesehatan dengan *stakeholders*.
- 4) Menyelenggarakan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan yang sehat.

3.3 TUJUAN DAN SASARAN UPTD RSUD DEPATI HAMZAH PANGKALPINANG

a. Tujuan

Tujuan pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi selama kurun waktu 5, tujuan yang akan dicapai UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

b. Sasaran

Sasaran merupakan gambaran yang diinginkan melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan dirumuskan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijaksanaan dan program yang dapat diukur dalam pencapaiannya. Sasaran yang ingin dicapai oleh UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang adalah Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat.

3.4 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN RENJA TAHUN 2024

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

- a. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit
- b. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Usulan program dan kegiatan UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 diharapkan dapat mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang serta diharapkan pelaksanaan Rencana Kerja UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 dapat mewujudkan visi dan misi tahun 2019-2023. Selanjutnya rumusan rencana program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang Tahun 2024

KODE	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						SUMBER PENDANAAN (Rp)..... **)		TOTAL ANGGARAN
		PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN		APRD KAB/KOTA	DAK	
		Tolak Ukur	Targot	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN							33.979.300.189	39.994.289.700	73.973.589.889
1.02.01	A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Dsarah	90,2					33.129.300.189		33.129.300.189
		Indoks Kepuasan Masyarakat	90							
1.02.01.2.10	1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD			Persentase Pelayanan BLUD	18%			33.129.300.189		33.129.300.189
1.02.01.2.10.01	a. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	33.129.300.189		33.129.300.189
1.02.02	A. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Depati Hamzah	90					850.000.000	39.994.289.700	40.844.289.700
		Indeks Capaian SPM	90%							
		Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	77%							
		Persentase pemenuhan alat kesehatan/alat penunjang medik di RSUD Depati Hamzah sesuai standar	100%							
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%							

KODE	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						SUMBER PENDANAAN (Rp)..... **)		TOTAL ANGGARAN
		PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN		APBD KAB/KOTA	DAK	
		Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.01	1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%			850.000.000	39.994.289.700	40.844.289.700
1.02.02.2.01.05	a. Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit					Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 unit	805.609.000	16.273.430.336	17.079.039.336
1.02.02.2.01.14	c. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 paket	44.391.000	23.720.859.364	23.765.250.364

Tabel 4.2

Rumusan Rencana Program, Kegiatan
Sub Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
BLUD UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang Tahun 2024

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN	KODE REKBERING	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN RENSTRA BLUD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET	
								2024	
								K	Rp
1	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan	Meningkatkan capaian indikator pelayanan	00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	89,97	90	22.846.225.189
			00.01.01.02	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran BLUD tepat waktu	%	100	100	4.999.000
			00.01.01.01.08	Penyusunan Dokumen Perencanaan BLUD	Jumlah Dokumen Perencanaan BLUD	dokumen	4	4	4.999.000
			00.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersumanya laporan keuangan BLUD sesuai SAK	%	100	100	15.965.571.093
			00.01.01.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	34	34	5.890.277.000
			00.01.01.02.09	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Non ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Non ASN	orang/ bulan	230	230	9.674.239.904
			00.01.01.02.11	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan BLUD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan BLUD	dokumen	1	1	65.969.000
			00.01.01.02.13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun BLUD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun BLUD	Laporan	1	1	87.499.000
			00.01.01.02.17	Penyediaan Jasa Asuransi	Jumlah orang yang diberikan asuransi	orang	226	226	337.586.189
			00.01.01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersumanya laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada BLUD	%		100	6.600.000
			00.01.01.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dan BLUD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada BLUD	Laporan	12	12	6.600.000
			00.01.01.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kawasan Perangkat Daerah	Persentase kontribusi pendapatan BLUD terhadap Pendapatan Rumah Sakit	%		100	24.800.000
			00.01.01.04.08	Perencanaan Pengelolaan Pendapatan BLUD	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pendapatan BLUD	dokumen	12	12	24.800.000

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN RENSTRA BLUD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET	
								2024	
								K	Rp
			00.01.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		100	685.414.000
			00.01.01.05.02	Pengadaan Paksi dan Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	paket		1	152.305.000
			00.01.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	20	24	533.209.000
			00.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah dan/atau BLUD	Persentase pelaksanaan administrasi umum	%		100	1.125.094.496
			00.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	171.899.000
			00.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	4	241.786.000
			00.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	1	225.335.496
			00.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1	252.305.000
			00.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan/atau BLUD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		25	187.899.000
			00.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	%		100	1.673.728.000
			00.01.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	unit		43	1.673.728.000
			00.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		100	2.328.270.000
			00.01.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	9.469.000
			00.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	2.207.283.000
			00.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	111.518.000

NO	TUJUAN RESTRAS	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN RESTRAS BLUD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET	
								2024	
								K	Rp
			00.01.01.09	Pemeliharaan Bering Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	1.031.748.600
			00.01.01.09.01	Perpetiadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	4	4	105.466.600
			00.01.01.09.02	Perpetiadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perorangan	unit	6	6	111.559.000
			00.01.01.09.06	Pemeliharaan Perlengkapan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit		30	562.518.000
			00.01.01.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	4	4	252.205.000
		Meningkatkan capaian SPN Kesehatan	02.01.02	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH	Indeks Capaian SPN Rumah Sakit	%	86,4	90	10.283.075.000
			02.01.02.03	Pelayanan nonmedik	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Nonmedik	%		100	10.283.075.000
			02.01.02.03.01	Pelayanan Farmasi	Jumlah Laporan Pelayanan Farmasi	Laporan		1	7.352.562.000
			02.01.02.03.03	Pengolahan Makanan/Gizi	Jumlah Dokumen hasil pengolahan makanan/gizi	dokumen		2	813.518.000
			02.01.02.03.04	Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan	Jumlah Sarana Prasarana dan alat kesehatan yang Dipelihara	unit		10	126.899.000
			02.01.02.03.07	Pelayanan Nonmedik Lainnya	Jumlah dokumen hasil pelayanan nonmedik lainnya	dokumen		6	489.705.000
			02.01.02.03.12	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	dokumen		2	774.638.000
			02.01.02.03.34	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Geriakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Geriakan Hidup Bersih dan Sehat	dokumen		10	17.649.000
			02.01.02.03.36	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah gedung Rumah Sakit yang dipelihara dan direhabilitasi	unit		2	452.205.000
			02.01.02.03.39	Pengalutan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat kesehatan yang di beli dan dipelihara	unit		2	151.899.000
			02.01.02.03.40	Pengadaan Bahan (Bahan Pakai)	Jumlah Paket Bahan Bahan pakai	paket		1	100.000.000
				TOTAL					33.129.300.189

Rencana Kerja (RENJA) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah Kota Pangkalpinang ini disusun dengan berusaha mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki rumah sakit dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhinya.

Dengan adanya dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan pelaksanaan kegiatan di UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang sesuai dengan rencana sehingga berjalan efektif, efisien dan terukur.
